

## Kepemimpinan Nasional yang Berjiwa Pancasila: Investasi Masa Depan Bangsa

Susi<sup>1</sup>, Otti Ilham Khair<sup>2\*</sup>, Jovan Prima Firmansyah<sup>3</sup>, Agus Salman<sup>4</sup> Joko Susilo Raharjo<sup>5</sup>

<sup>1</sup>Universitas Pamulang, Indonesia

<sup>2,3,4,5</sup>Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara, Indonesia

**Abstrak**--Pancasila sebagai dasar negara dan sumber dari sumber hukum bangsa Indonesia, diperoleh dari hasil pemikiran yang sudah ada jauh sebelum merdeka. Dengan demikian perlu diimplementasikan ke dalam jiwa para pemimpin bangsa Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk kepemimpinan nasional yang berjiwa pancasila sehingga dapat menjadi investasi masa depan bangsa. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan mealalui kajian literatur berupa telaahan dokumen yang relevan dengan penelitian ini. Hasil yang diperoleh adalah bahwa kepemimpinan nasional yang berjiwa Pancasila dapat menjadi investasi masa depan bangsa dengan menerapkan nilai Pancasila dan memiliki gaya kepemimpinan transformasional dan demokratis. Kepemimpinan nasional berdasarkan Pancasila membutuhkan komitmen dan kolaborasi dari berbagai pihak. Indonesia dapat maju menjadi negara yang berdaulat, adil, dan makmur sesuai dengan cita-cita pendirinya dengan mengatasi tantangan yang dihadapi dan memanfaatkan peluang yang ada.

### **Kata kunci:**

Kepemimpinan Nasional,  
Jiwa Pancasila,  
Investasi Masa Depan

### **Histori:**

Dikirim: 19 Maret 2024  
Direvisi: 28 Maret 2024  
Diterima: 28 Maret 2024  
Online: 2 April 2024

©2024 JCV



Author(s) agree that this article remains permanently open access under the terms of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

### **Identitas Artikel:**

Susi, Susi., Khair, Otti and Ilham., Firmansyah, Jovan and Prima., Salman, Agus., & Raharjo, Joko and Susilo. (2024). Kepemimpinan Nasional yang Berjiwa Pancasila: Investasi Masa Depan Bangsa. *Jurnal Citizenship Virtues*, 4(1), 695-703.

<sup>2\*</sup>Corresponding author.

E-mail: [otti.ilham1610@gmail.com](mailto:otti.ilham1610@gmail.com)

## PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang sedang membangun di segala bidang. Dengan demikian diperlukan kepemimpinan nasional yang berlandaskan pada nilai-nilai kepribadian Pancasila untuk mengantisipasi perubahan di tengah dinamika sosial, politik, dan ekonomi saat ini. Seiring dengan perubahan global yang cepat dan kompleks, tantangan yang dihadapi oleh negara-negara dalam membangun kepemimpinan nasional yang efektif semakin meningkat. Di Indonesia, sebagai negara dengan keberagaman budaya, agama, dan suku, membangun kepemimpinan yang mampu menyatukan visi, nilai, dan tujuan bangsa menjadi suatu keharusan yang mendesak. Dalam konteks ini, Pancasila, sebagai falsafah negara, memberikan landasan yang kuat untuk pembangunan kepemimpinan nasional yang inklusif dan berkeadilan. Nilai-nilai yang tertanam dalam pancasila dan merupakan kekayaan bangsa yang terpendam jauh dalam sejarah (Rosi et al., 2021).

Namun demikian, implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kepemimpinan nasional tidaklah mudah. Berbagai tantangan muncul, baik dari dalam maupun luar, yang menguji konsistensi dan integritas pemimpin dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam setiap kebijakan dan tindakan mereka. Tantangan ini meliputi kompleksitas dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, menghadapi tekanan global yang beragam, serta mengelola konflik dan ketegangan internal dengan bijaksana. Dalam konteks ini, penulisan ini bertujuan untuk mengeksplorasi tantangan dan prospek dalam membangun kepemimpinan nasional yang berkepribadian Pancasila sebagai asset masa depan bangsa Indonesia. Dengan menganalisis faktor-faktor yang mampu mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kepemimpinan nasional, diharapkan dapat ditemukan strategi dan solusi yang efektif untuk menghadapi tantangan tersebut. Melalui pemahaman yang mendalam tentang hubungan antara kepemimpinan nasional dan nilai-nilai Pancasila, maka diharapkan dapat terwujud visi Indonesia sebagai negara yang adil, makmur, dan berdaulat, sesuai dengan cita-cita pendiri bangsa.

Kepemimpinan yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila merupakan upaya membumikan Pancasila pada semua organisasi/lembaga, baik ditingkat lokal, nasional, bahkan dunia. Kepemimpinan Pancasila tentunya harus dapat menginternalisasikan dan mengambil seluruh nilai-nilai Pancasila dan menerapkannya saat dunia sedang berjalan. Organisasi dan lembaga bertanggung jawab untuk mengukuhkan, membentuk, menyatukan, dan menciptakan masyarakat yang berasaskan Pancasila di setiap aspek kehidupan. Pemimpin organisasi atau lembaga adalah kunci untuk mewujudkan lingkungan dan budaya yang Pancasila. Mereka bertanggung jawab untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada anggotanya dalam setiap kegiatan dan program organisasi. Sebagai identitas nasional Pancasila juga menjadi identitas nasional Indonesia yang membedakan Indonesia dengan negara lain. Kepemimpinan yang berbasis Pancasila dapat menjadi representasi yang kuat dan konsisten dari identitas nasional Indonesia. Sebagaimana dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara, "Pancasila adalah jiwa bangsa Indonesia. Kepemimpinan yang berlandaskan Pancasila harus menjadi cerminan dari identitas nasional kita." (Hernandi, 2023). Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui bentuk kepemimpinan nasional yang berjiwa pancasila sehingga dapat menjadi investasi masa depan bangsa.

### **Konsep Kepemimpinan yang Berjiwa Pancasila**

Kepemimpinan Pemerintahan yang berkarakter dan berjiwa Pancasila merujuk pada konsep kepemimpinan yang didasarkan pada prinsip-prinsip Pancasila, yang merupakan dasar negara Indonesia. Prinsip-prinsip ini mencakup nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan. Kepemimpinan Pancasila berupaya menciptakan kepemimpinan yang inklusif, adil, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kesejahteraan serta kemajuan bangsa Indonesia secara keseluruhan. Pada organisasi yang mengharapkan dapat memperoleh kemajuan dalam aspek atau bidang usahanya, maka suatu kepemimpinan yang baik merupakan hal yang mutlak diperlukan oleh organisasi dimaksud, terutama dalam hal keahlian pada bidang tersebut, hal ini dimaksudkan agar dapat menghindarkan dari keputusan-keputusan yang bersifat spekulatif, sehingga pada akhirnya mampu diputuskan dengan lebih terarah, kemudian terhindar dari pengambilan keputusan yang terburu-buru dan menggunakan tenaga kerja serta alat produksi yang dimiliki organisasi secara berdayaguna serta berhasilguna. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mampu membangun nilai dan norma bersama kelompok yang dia ayomi dimana orang tersebut berkiprah (Kariadi et al., 2017).

Kepemimpinan yang berjiwa Pancasila tentu saja perlu memiliki gaya kepemimpinan secara transformasional. Menurut Robbins (dalam Edison, 2016), gaya kepemimpinan transformasional merupakan pemimpin yang mampu merangsang serta menginspirasi (mentransformasi) para bawahannya untuk hal yang luar biasa. Apabila dilihat bagaimana konsep kepemimpinan transformasional dapat terkait dengan nilai-nilai Pancasila seperti gotong royong, demokrasi, dan keadilan sosial sebagai fondasi transformasi yang dibawa oleh seorang pemimpin. Seorang pemimpin transformasional bukan hanya sekadar memerintah, tetapi lebih dari itu, ia mampu mengilhami dan memotivasi bawahan untuk mencapai tujuan bersama. Ia memiliki visi yang jelas tentang masa depan yang lebih baik dan mampu mengomunikasikan visi tersebut dengan cara yang menginspirasi orang lain untuk bergerak maju dan juga memiliki semangat gotong royong. Konsep gotong royong dalam Pancasila menekankan pentingnya kerjasama dan solidaritas dalam mencapai tujuan bersama. Seorang pemimpin transformasional memperkuat konsep ini dengan mendorong kolaborasi dan partisipasi aktif dari seluruh anggota organisasi atau masyarakat dalam mencapai visi bersama. Seorang pemimpin harus memiliki semangat demokrasi. Prinsip demokrasi dalam Pancasila menegaskan pentingnya partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan dan pembangunan negara. Seorang pemimpin transformasional menerjemahkan nilai ini dengan mendorong partisipasi dan keterlibatan aktif dari semua pihak dalam proses pengambilan keputusan dan pembangunan yang inklusif.

Seorang pemimpin juga harus memiliki keadilan sosial. Nilai keadilan sosial dalam Pancasila menekankan pentingnya distribusi yang adil dari sumber daya dan kesempatan kepada seluruh rakyat Indonesia. Seorang pemimpin transformasional menjadikan nilai ini sebagai fondasi dalam kebijakan dan tindakan mereka, dengan berupaya untuk mengurangi kesenjangan sosial dan memberikan kesempatan yang sama bagi semua. Dengan mengintegrasikan konsep kepemimpinan transformasional dengan nilai-nilai Pancasila, seorang pemimpin dapat menciptakan lingkungan yang memungkinkan perubahan positif dan pertumbuhan yang berkelanjutan. Melalui inspirasi, motivasi, dan arahan yang diberikan kepada bawahannya, pemimpin dapat membawa transformasi yang nyata dalam

masyarakat, menuju Indonesia yang lebih adil, demokratis, dan sejahtera bagi semuaarganya. Yukl mengatakan bahwa leadership (kepemimpinan) merupakan suatu proses saat seseorang individu mampu memengaruhi anggota group yang lainnya demi mencapai suatu tujuan organisasi. Pada studi kepemimpinan menunjukkan bahwa kepemimpinan mempunyai dua gaya kepemimpinan, yaitu kepemimpinan transaksional dan kepemimpinan transformasional (Priyono, 2007). Seorang pemimpin yang memiliki jiwa Pancasila senantiasa berusaha untuk mengimplementasikan fungsi kepemimpinannya dengan berdasarkan nilai-nilai Pancasila (Tambatua, 2023). Menjadi pemimpin yang mulia jika kepemimpinannya mampu membuat rakyatnya sejahtera atas tindakannya yang berkarakter Pancasila. Pemimpin berjiwa Pancasila memiliki peran dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur Pancasila dan mengawasi proses pembangunan sesuai dengan berbagai peraturan agar hasilnya dapat dinikmati seluruh rakyat Indonesia (Gayatri, 2023).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan menggunakan studi pustaka. Studi pustaka dilakukan dengan mengumpulkan, membaca, menganalisis literatur seperti buku, jurnal, dan dokumen lainnya untuk mengumpulkan literatur yang relevan dengan topik penelitian, membuat kerangka untuk memahami dan membaca literatur, menganalisis dan mengevaluasi literatur yang telah dikumpulkan. Pada tahap analisis, dilakukan dengan mengumpulkan data yang relevan, mengaturnya, dan membuat sintesis atas hasil yang diperoleh. Setelah itu kemudian akan menafsirkan hasil dan menemukan maknanya. Adapun literatur yang diambil dalam penelitian ini adalah literatur yang berkaitan dengan kepemimpinan nasional yang berjiwa Pancasila.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Tantangan dalam Membangun Kepemimpinan Berjiwa Pancasila**

Pembangunan kepemimpinan nasional yang berjiwa Pancasila menghadapi sejumlah tantangan yang kompleks, yang memerlukan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan untuk dapat diatasi. Salah satu tantangan utama adalah menyeimbangkan keberagaman masyarakat Indonesia dengan kebutuhan akan persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam banyak literatur, jelas dikemukakan bahwa Pancasila adalah *Grundnorm* atau norma dasar, yang merupakan sumber dari segala sumber hukum yang berlaku dan yang akan diberlakukan di Indonesia. Hans Kelsen menyatakan *grundnorm* adalah alasan formal yang menjadi validitas norma hukum (Manullang, 2020). Pancasila berkedudukan sebagai landasan unsur konstitutif dan regulatif, sebagai *Grundnorm* sumbernya dari segala sumber hukum dan landasan filosofis dari bangunan hukum nasional, dan pelbagai manifestasi budaya Indonesia yang memancarkan dan menghadirkan "*Geistlichen Hintergrund*" yang khas. Kepemimpinan yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila merupakan upaya membumikan Pancasila pada semua organisasi/lembaga, baik ditingkat lokal, nasional, bahkan dunia. Kepemimpinan Pancasila tentunya harus dapat menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila secara mutlak dan implementatif di tengah terbukanya tatanan global. Organisasi/lembaga sebagai tempat berkumpulnya orang mengemban tugas untuk mengukuhkan, memformulasikan,

menyatukan, dan menciptakan masyarakat yang berasaskan Pancasila disetiap sendi-sendi kehidupan. Pimpinan organisasi/lembaga merupakan kunci utama dapat terwujudnya lingkungan dan budaya organisasi/lembaga yang Pancasila. Pimpinan dalam seluruh kegiatan memiliki kewajiban menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada anggotanya, dengan memasukkan kandungan nilai-nilai Pancasila dalam setiap kegiatan dan program organisasi/Lembaga.

Kepemimpinan Pancasila merujuk pada gaya kepemimpinan yang didasarkan pada prinsip-prinsip Pancasila, dasar negara Indonesia. Pancasila merupakan ideologi dasar negara yang terdiri dari lima sila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Sebagai dasar negara dan ideologi bangsa Pancasila telah ditetapkan sebagai dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia sejak Proklamasi Kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Oleh karena itu, kepemimpinan yang berbasis Pancasila sangat penting untuk menjaga kesinambungan dan stabilitas negara. Keberagaman yang menjadi ciri khas masyarakat Indonesia, baik dari segi budaya, agama, suku, maupun bahasa, menjadi sebuah potensi besar namun juga menyulitkan dalam mencapai konsensus nasional. Tantangan ini semakin diperparah oleh meningkatnya polarisasi politik, terutama dalam periode pascareformasi, yang menyebabkan perpecahan dan ketidaksepakatan diantara kelompok-kelompok politik. Selain itu, ketegangan antaragama juga merupakan tantangan yang signifikan dalam pembangunan kepemimpinan berkepribadian Pancasila. Konflik horizontal antaragama yang terkadang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam penghayatan dan penerapan nilai-nilai keberagaman dan toleransi di tengah masyarakat.

Ketimpangan sosial-ekonomi juga menjadi faktor penting yang mempengaruhi stabilitas negara. Disparitas pendapatan, akses terhadap pendidikan dan kesehatan, serta kesenjangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan menjadi sumber ketidakpuasan dan ketegangan sosial yang dapat mengancam stabilitas nasional. Di samping itu, adanya intervensi asing dan pengaruh globalisasi juga menjadi faktor yang memperumit proses pembangunan kepemimpinan nasional yang berakar pada nilai-nilai Pancasila. Pengaruh media sosial dan informasi dari luar negeri, serta tekanan dari aktor-aktor internasional terkadang dapat mengganggu kedaulatan negara dan memperdebatkan nilai-nilai kebangsaan yang telah ada.

Dengan demikian dibutuhkan pemimpin nasional yang berkarakter atau berkepribadian Pancasila. Karakter kepemimpinan Pancasila ialah seorang pemimpin yang menyelipkan nilai-nilai Pancasila seperti religius, beretika, dan bertanggung jawab dalam gaya kepemimpinannya, sehingga akan menarik pengikutnya tersebut yang setia memegang teguh nilai-nilai yang ditinggalkannya hingga generasi-generasi berikutnya ( Permady et al., 2021). Filsafat Pancasila dapat didefinisikan sebagai refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa, dengan tujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengertiannya secara mendasar dan menyeluruh. Filsafat mampu membuka pemikiran yang lebih luas dan rasional sehingga cara pandang terhadap ideologi menjadi lebih terbuka dan fleksibel (tidak kaku atau beku). Manusia diberi peluang mengembangkan

persepsi, wawasan dan sikapnya secara dinamis agar menemukan kebenaran, arti dan makna hidup.

Dalam proses pemilihan pemimpin, integritas calon pemimpin memegang peranan sentral, terutama dalam konteks jiwa Pancasila Kejujuran dan moralitas bukan hanya menjadi fondasi kuat untuk membangun kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat, tetapi juga menjadi cerminan dari nilai-nilai Pancasila. Seorang pemimpin yang berjiwa atau berkarakter Pancasila merupakan investasi dan juga asset berharga bagi bangsa Indonesia untuk mewujudkan tujuan dari didirikannya negara Indonesia. Untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut, diperlukan langkah-langkah konkret seperti penguatan pendidikan karakter berbasis Pancasila, promosi dialog antaragama dan antarsuku, kebijakan yang berpihak kepada pembangunan ekonomi inklusif, serta peningkatan kerja sama internasional yang mengedepankan kedaulatan dan kepentingan nasional. Dengan demikian, pembangunan kepemimpinan nasional yang berkepribadian Pancasila dapat terus berjalan menuju cita-cita Indonesia sebagai negara yang adil, makmur, dan berdaulat.

### **Membangun Kepemimpinan Berjiwa Pancasila**

Meskipun tantangan-tantangan yang kompleks dihadapi dalam membangun kepemimpinan berjiwa Pancasila, terdapat pula sinar harapan yang terpancar dalam perjalanan ini. Berbagai harapan yang cerah mengemuka, memberikan keyakinan bahwa implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kepemimpinan nasional bukanlah sebuah mimpi yang mustahil, tetapi sebuah realitas yang dapat direalisasikan dengan komitmen dan kerjasama yang kokoh dari berbagai pihak. Salah satu prospek utama adalah semangat dan komitmen yang tampak dari berbagai lapisan masyarakat. Pemimpin politik, akademisi, dan anggota masyarakat sipil telah menunjukkan kesadaran akan pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam membentuk kepemimpinan yang berintegritas dan berkeadilan. Tindakan nyata seperti penyusunan kebijakan publik yang berpihak pada kepentingan rakyat, advokasi untuk penegakan hukum yang adil, dan partisipasi aktif dalam memperjuangkan hak-hak sosial menjadi bukti konkret dari semangat ini. Kepemimpinan pada suatu pemerintahan dengan berbasiskan Pancasila tidak hanya merupakan sebagai penguasa dalam berpolitik semata, namun juga mampu untuk menjadi penjaga nilai-nilai dari aspek moral serta etika pada suatu tataran tatanan pemerintahan. Pancasila sebagai dasar filosofis negara Indonesia, memberikan panduan nilai yang mencakup keadilan, gotong royong, demokrasi dan Ketuhanan yang Maha Esa. Dengan menerapkan prinsip Pancasila, pemerintahan dapat memimpin dengan dengan integritas, transparansi dan keadilan sebagai pilar utama dalam pengelolaan negara. Selain itu mampu proaktif jiwa wirausaha, koordinasi, penguasaan lingkungan, dan harus dapat memahami dan sanggup untuk menghadapi dan mengatasi kompleksitas permasalahan nasional dan internasional sehingga diperlukan kenegarawanan (Suradinata, 2016).

Selain itu, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memberikan peluang baru dalam meningkatkan partisipasi publik dalam proses pembangunan kepemimpinan berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Melalui media sosial, platform daring, dan berbagai aplikasi yang tersedia, masyarakat dapat lebih mudah terlibat dalam diskusi, pengambilan keputusan, dan pelaporan terhadap berbagai isu yang berkaitan dengan kepemimpinan nasional. Dengan demikian, partisipasi aktif

masyarakat dalam memperkuat implementasi nilai-nilai Pancasila menjadi semakin mungkin terwujud. Sebagai lanjutan dari hal ini, diperlukan upaya konkret untuk memperkuat semangat dan komitmen dari berbagai pihak serta memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dengan bijaksana. Langkah-langkah seperti penyelenggaraan dialog publik yang inklusif, penguatan kerja sama antara pemimpin politik, akademisi, dan masyarakat sipil, serta peningkatan literasi digital dan partisipasi masyarakat dalam ruang publik dapat menjadi upaya nyata dalam memperkuat pembangunan kepemimpinan berkepribadian Pancasila. Pancasila merupakan sistem nilai yang digali dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Nilai-nilai tersebut telah ada jauh sebelum Indonesia merdeka. Bahkan pada masa kerajaan telah berkembang nilai-nilai dasar yang merupakan karakter masyarakat. Gerakan demokratisasi dalam pemerintahan adalah dalam bentuk *reinventing government*, menciptakan *clean government and good governance*, desentralisasi pemerintahan, dan sebagainya. Dalam bidang informasi, globalisasi terwujud dalam internet, *cybernetic society* dan *web society*, suatu jaringan antar manusia yang bebas tidak dihambat oleh batas-batas antar negara dalam mengadakan tukar menukar informasi. Selain itu perlu adanya kolaborasi yang kuat antara pemangku kepentingan dengan diinisiasi oleh pemimpin yang berkepribadian Pancasila. Dengan demikian, melalui kolaborasi yang kuat antara berbagai pihak dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi secara bijaksana, Indonesia dapat membangun kepemimpinan nasional yang berkepribadian Pancasila yang sesuai dengan semangat dan cita-cita pendiri bangsa, menuju Indonesia yang adil, makmur, dan berdaulat.

Beberapa karakteristik pemimpin yang harus dimiliki dalam kepemimpinan Pancasila antara lain mewarisi semangat para tokoh bangsa. Pemimpin diharapkan mampu mewarisi semangat para tokoh bangsa dan merepresentasikan kepemimpinan Pancasila. Selain itu memiliki jiwa pelayan. Pemimpin perlu memiliki jiwa pelayan yang mengacu pada nilai Pancasila dan berjiwa kerahiman. Pemimpin berjiwa Pancasila juga harus Inklusif, Adil, dan Bertanggung Jawab. Kepemimpinan Pancasila berupaya menciptakan kepemimpinan yang inklusif, adil, dan bertanggung jawab, serta berorientasi pada kesejahteraan dan kemajuan bangsa Indonesia secara keseluruhan. Menerapkan nilai-nilai luhur juga merupakan karakteristik dari seorang pemimpin yang memiliki jiwa kepemimpinan Pancasila akan menerapkan nilai-nilai luhur, seperti nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan.. Pemimpin harus mampu menghayati nilai-nilai Pancasila serta memahami makna Bhineka Tunggal Ika, dan nilai-nilai tersebut harus menjadi dasar dalam setiap kebijakan yang diambil. Dengan memiliki karakteristik-karakteristik tersebut, diharapkan pemimpin mampu memimpin dengan berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila dan mampu membawa bangsa menuju kesejahteraan dan kemajuan yang berkelanjutan. Pemimpin yang baik memiliki misi untuk membawa penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia ke arah terwujudnya kehidupan yang ber-ketuhanan, ber-kemanusiaan, ber-persatuan, ber-kerakyatan, dan ber-keadilan. Kepemimpinan berjiwa Pancasila juga membutuhkan pemahaman tentang pluralitas, yang menjadi dasar untuk mengatur keadilan dan keharmonian dalam masyarakat

## KESIMPULAN

Dalam pembangunan kepemimpinan nasional yang berkepribadian Pancasila, terdapat tantangan yang kompleks namun juga harapan yang cerah. Kepemimpinan juga tak bisa lepas dengan kecenderungan perkembangan geopolitik dan geostrategi dunia maupun Indonesia. Dengan demikian tantangan yang perlu dijawab oleh pemimpin bangsa yang berkepribadian Pancasila. Tantangan tersebut antara lain adalah menyeimbangkan keberagaman masyarakat Indonesia dengan kebutuhan akan persatuan dan kesatuan bangsa, serta menghadapi intervensi asing dan pengaruh globalisasi yang memperumit proses pembangunan kepemimpinan yang berakar pada nilai-nilai Pancasila. Namun, melalui pendekatan holistik dan berkelanjutan, serta penerapan sejumlah strategi efektif seperti penguatan pendidikan Pancasila, peningkatan dialog antaragama, keterlibatan masyarakat sipil, prospek dalam membangun kepemimpinan berkepribadian Pancasila menjadi semakin memungkinkan. Pemimpin yang berjiwa Pancasila adalah pemimpin yang mampu menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, memahami makna Bhineka Tunggal Ika, serta memperhatikan kepentingan rakyat dalam setiap kebijakan yang diambil. Mereka juga diharapkan memiliki jiwa pelayan, berjiwa terbuka, dan mau belajar, serta menjaga kesatuan bangsa dan kerahiman. Selain itu, kepemimpinan Pancasila juga mencakup aspek spiritual, humanis, nasionalis, demokratis, dan keadilan sosial

Kepemimpinan nasional yang berjiwa Pancasila adalah suatu perjalanan yang membutuhkan komitmen dan kerjasama dari berbagai pihak. Dengan mengatasi tantangan yang dihadapi dan memanfaatkan prospek yang ada, Indonesia dapat melangkah maju sebagai negara yang berdaulat, adil, dan makmur, sesuai dengan cita-cita pendiri bangsa. Dengan demikian, menjaga integritas dan kesucian nilai-nilai Pancasila dalam kepemimpinan nasional adalah kunci dalam membangun masa depan yang lebih baik bagi bangsa dan negara. Dengan demikian maka terciptalah pemimpin sebagai investasi masa depan bangsa Indonesia,

## REFERENSI

- Edison, E. (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia: Strategi dan perubahan dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai dan organisasi*. Alfabeta.
- Gayatri, M. (2023). Kepemimpinan Pancasila dalam Pencegahan Korupsi di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(2), 14369–14373.
- Hernandi, A. (2023). MODEL KEPEMIMPINAN PANCASILA DALAM MASYARAKAT PLURAL: SEBUAH KAJIAN PUSTAKA. *Pembumian Pancasila*, 3(1), 58–64.
- Kariadi, D., Suprpto, W., & Singkawang, S. (2017). Membangun Kepemimpinan Berbasis Nilai-Nilai Pancasila Dalam Perspektif Masyarakat Multikultural. *Citizenship Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 5(2), 87–96. <http://e-journal.unipma.ac.id/index.php/citizenship>
- Manullang, E. F. M. (2020). MEMPERTANYAKAN PANCASILA SEBAGAI GRUNDNORM: SUATU REFLEKSI KRITIS DALAM PERSPEKTIF FONDASIONALISME. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(2), 284–301. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no2.2584>

- Permady, G. C., Zulfikar, G., Sulistiono, A., & Ferdinan Nugroho Laim, B. (2021). PEMBENTUKAN KARAKTER KEPEMIMPINAN PANCASILA DI POLITEKNIK PELAYARAN SORONG (Suatu Telaah Pada Mata Kuliah Pendidikan Pancasila). *Junal Patria Bahari*, 1(2), 35–45.  
[www.ojs.poltekpelsorong.ac.id](http://www.ojs.poltekpelsorong.ac.id)
- Priyono. (2007). *Pengantar Manajemen*. Zifatama.
- Rosi, F., Handoko, P., Imeldatur Rohmah, E., & Kunci, K. (2021). Implementasi Nilai Demokrasi Pancasila dalam Model Kepemimpinan di Indonesia. *Sosio Yustisia*, 1(1), 71–87.
- Suradinata, E. (2016). *Analisis Kepemimpinan: Strategi Pengambilan Keputusan* (3rd ed.). Alqaprint Jatinangor.
- Tambatua, J. S. (2023, May 18). *Karakteristik Pemimpin yang Berkarakter Pancasila di Abad ke-21*. Kompasiana.Com.